



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

PANJA PENGUPAHAN KOMISI IX DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 28
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Ketua Yayasan Akatiga Bandung;
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 7 Maret 2016
Pukul	: 14.00 WIB–selesai
Acara	: Menerima Masukan Terkait PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Ketua Rapat	: Dede Yusuf M.E, S.T, M.I.Pol / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 13 orang dari 31 orang Anggota Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI B. Ketua Yayasan Akatiga Bandung beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI dengan Ketua Yayasan Akatiga Bandung, dibuka pukul 15.20 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Yayasan Akatiga Bandung terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 menyampaikan masukan antara lain :
 - a. Tidak adanya penjelasan untuk Pasal 42 ayat (5) tentang Peninjauan KHL 5 tahun sekali.
 - b. Pasal 43 ayat (6) berimplikasi pada sentralisasi dan mengabaikan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan.

- c. Meniadakan sanksi pidana pelanggaran upah minimum sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan menggantinya dengan sanksi administratif.
 - d. Memberikan rekomendasi bahwa PP Nomor 78 Tahun 2015 agar:
 - (1) Direvisi secara lebih cermat dalam memperhatikan UU dan Peraturan-peraturan yang terkait sehingga konsisten dan tidak tumpang tindih.
 - (2) Proses revisi dilakukan secara transparan dan partisipatif berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
 - (3) Memperjelas arah PP, sentralisasi atau desentralisasi.
 - (4) Mengembalikan sanksi pidana untuk efek jera.
2. Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi kepada Yayasan Akatiga Bandung atas masukan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI hari ini, Senin, 7 Maret 2016. Masukan tersebut akan menjadi referensi Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI dalam menyusun rekomendasi Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI.

Rapat diakhiri pukul 16.10 WIB

**Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,**



DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol

A-451